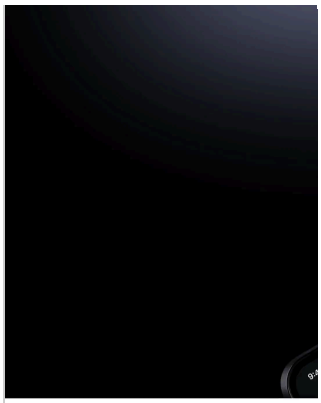

Trading Forex, Indeks, dan CFD Emas
<13ms eksekusi ultra-cepat

Trading dengan FxPro

Memperkuat Integritas 'Wakil Tuh

Reporter: | Editor: **Martha** | Selasa , 06 May 202

Muhammad Syahri Ramadhan Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
Foto:Ist/Sumateraekspres.id--

Ibarat luka lama yang belum sembuh, skandal suap di tubuh kehakiman justru muncul tak lama setelah para hakim menyuarakan tuntutan kenaikan gaji yang dianggap tak lagi layak.

Ironisnya, di tengah desakan akan kesejahteraan, justru muncul pertanyaan getir: apakah rendahnya gaji bisa dijadikan pembenaran atas perilaku suap?

Data dari Indonesian Corruption Watch (ICW) menyebutkan, sebanyak 29 hakim ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi.

Advertisement

x

BACA JUGA:Sayyidah Nadhriyatul Mufarroch Gadis 22 Tahun Berangkat Haji Lebih Cepat, Jadi Mahram Sang Ibu

BACA JUGA:Teror WhatsApp Mengguncang Ario, Mahasiswa Ini Laporkan Ancaman Pembunuhan ke Polisi

Fenomena ini menegaskan bahwa mafia peradilan di negeri ini bukanlah isapan jempol. Memberantasnya butuh lebih dari sekadar niat baik. Butuh komitmen, keberanian, dan reformasi menyeluruh.

Dalam konteks hukum, mafia peradilan merupakan wajah dari kejahatan kerah putih (white collar crime) yang licik dan penuh rekayasa.

BACA JUGA:Honda NS150GX Meluncur Gaya Sporty Gahar, Fitur Lebih Lengkap Harga Murahnya Bikin Kaget

menggunakan jabatan, kekuasaan, dan regulasi hukum untuk keuntungan pribadi.

Mereka mampu mengatur alur birokrasi, bahkan menyusup ke lingkaran pembuat regulasi agar bisnis haram tampak sah di mata hukum.

1 2 3 »

Tag # 'wakil tuhan' # memperkuat integritas # putusan pengadilan tipikor palembang

Memperkuat Integritas 'Wakil Tuh

Reporter: | Editor: **Martha** | Selasa , 06 May 2025

Muhammad Syahri Ramadhan Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
Foto:Ist/Sumateraekspres.id--

klasiknya menegaskan bahwa hukum adalah petugas. Artinya, wajah hukum tercermin dari perilaku aparatnya.

BACA JUGA:Siap-Siap Payung Rabu 7 Mei, Hujan Sore Diprediksi Landa Hampir Semua Wilayah di Sumsel

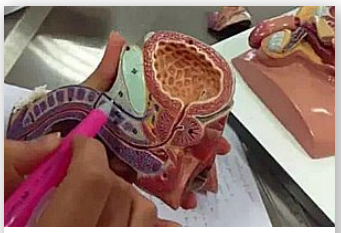
Waspadai prostatitis: cobalah ini di kamar mandi di pagi hari

Warga Jakarta, hentikan sakit lutut! Cara ini bisa membantu Anda!

Apakah Anda berusia di atas 55 tahun? Meringankan gejala prostatitis

Orang yang menderita nyeri lutut dan pinggul harus segera mulai menggunakan..

Perpaduan alami ini akan membantu membuat perut Anda rata dalam hitungan hari

Perpaduan alami ini akan membantu membuat perut Anda rata dalam hitungan hari

BACA JUGA:Mobil Listrik GWM Ora 03 Siap Mengaspal Desain Futuristik Harga Terjangkau, Spesifikasinya Bikin Tercengang

Di sinilah krisis integritas menjadi sorotan utama. Sebab, bagaimana mungkin masyarakat bisa percaya pada hukum jika penegaknya sendiri menodai keadilan?

Dari ketiganya, struktur adalah wajah nyata di lapangan. Maka, jika wajah ini ternoda, maka seluruh sistem ikut tercoreng.

Sayangnya, di Indonesia, praktik hukum masih tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Sebuah adagium lama yang masih relevan hingga kini.

BACA JUGA:Lowongan PT Freeport Dibuka Mei 2024: Dua Posisi Strategis Gaji Besar Menantimu Sekarang, Buruan Lamar!

BACA JUGA:Bongkar Korupsi Tambang dan Inspektorat, Kejari Lahat Serahkan Uang Negara Rp 1 Miliar

Banyak masyarakat memandang hukum sebagai alat kekuasaan, bukan alat keadilan. Ini adalah refleksi dari buruknya integritas para penegak hukum, khususnya hakim.

Salah satu cara memperkuat integritas adalah dengan menerapkan sistem meritokrasi berbasis pengawasan akademik.

Di Belanda, putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap secara otomatis dikirim ke para guru besar untuk dianotasi.

Jika ditemukan kelemahan atau penyimpangan dalam putusan, maka hal itu dapat menghambat promosi karier hakim tersebut.

Mengingat sistem hukum Indonesia banyak mengadopsi hukum Belanda, tak ada salahnya jika sistem anotasi akademik juga diadaptasi.

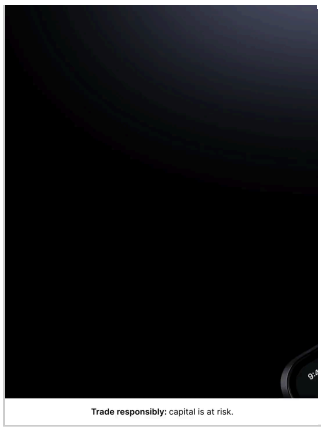

Trading Forex, Indeks, dan CFD Emas
<13ms eksekusi ultra-cepat

Trading dengan FxPro

Memperkuat Integritas 'Wakil Tuhan

Reporter: | Editor: **Martha** | Selasa , 06 May 2025 - 1

Muhammad Syahri Ramadhan Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
Foto:Ist/Sumateraekspres.id--

BACA JUGA:3 Rumah Terbakar di Musi Rawas yang Hendak Dipadamkan Mobil Damkar Naas Rata dengan Tanah

BACA JUGA:Hendak Padamkan Kebakaran Rumah, Mobil Damkar Pemkab Musi Rawas Terbalik, Seorang Pemadam Meregang Nyawa

Ini akan menjadi bentuk kontrol eksternal yang objektif dan berbasis keilmuan, bukan hanya pengawasan internal dari Mahkamah Agung atau Komisi Yudisial.

Apakah Anda berusia di atas 55 tahun? Meringankan gejala prostatitis

Perpaduan alami ini akan membantu membuat perut Anda rata dalam hitungan hari

Warga Jakarta, hentikan sakit lutut! Cara ini bisa membantu Anda!

Orang yang menderita nyeri lutut dan pinggul

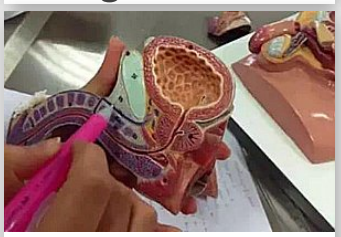
Waspadai prostatitis: cobalah ini di

Perpaduan alami ini akan membantu

Ketika aparat lambat bertindak, tekanan warganet mampu menggiring opini publik dan mendorong proses hukum.

Advertisement

x

Kasus vonis bebas Gregorius Ronald Tannur, misalnya, memicu gelombang protes di dunia maya yang berujung pada penangkapan tiga hakim di PN Surabaya. Ini menjadi bukti bahwa suara publik tak bisa diremehkan.

BACA JUGA:Breaking News! Lidah Api Ialap Rumah Kayu Milik Warga Musi Rawas

x

Sebuah bahaya laten yang tak boleh dibiarkan tumbuh, sekalipun lahir dari rasa kecewa terhadap institusi hukum.

Membangun kembali kepercayaan publik adalah pekerjaan rumah besar. Pengawasan berlapis, kesejahteraan yang layak, serta pendidikan integritas sejak dini menjadi elemen penting dalam menciptakan hakim yang benar-benar menjadi penjaga keadilan, bukan perusaknya.

Di tengah sorotan publik yang semakin tajam, para hakim harus menyadari bahwa palu yang mereka ketuk tak hanya memutus perkara, tapi juga menentukan nasib kepercayaan masyarakat terhadap hukum itu sendiri.